

jurnal ekowisata siap kirim

by Ahmad Hidayatullah

Submission date: 07-Jan-2022 01:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1738410108

File name: Ekowisata_Tambangan_fix.rtf (118.23K)

Word count: 3606

Character count: 23283

7
Pemberdayaan Masyarakat berbasis Ekowisata
(Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Bengkok Menjadi Ekowisata “Taman Stambran” di Desa
Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang)

Ahmad Hidayatullah¹, Rikzam Kamal², Izza Himawanti³, Khaerunnisa Tri Darmaningrum⁴

^{1,2,3,4} IAIN Pekalongan

ahmad.hidayatullah@iainpekalongan.ac.id

Abstract

The orientation of the village community began to change from agrarian to industrial. resulting in decreased interest in the agrarian world - both agriculture and plantations - in rural communities, especially in areas close to the city, one of which is the village of Tambangan in Semarang. Therefore, changes in orientation also appear in crooked land management. The idea began to emerge to convert the crooked land into a more productive ecotourism area. This article uses a qualitative descriptive research method, and this article tries to explore community empowerment through ecotourism in Tambangan village. The results of this study indicate that the conversion of crooked land in RW 1 Tambangan can run smoothly without any internal conflicts. The presence of ecotourism in the region actually generates new ideas that have positive potential both socially and economically. The ecotourism concept applied by residents of RW 1 Tambangan is manifested in an integrative pattern between playing and learning in nature with the name “Taman Stambran” ecotourism. In addition, the positive impact on the economic sector is very meaningful for small traders who are native to the region. This positive result in the economic sector can be seen from the start of the establishment of small shops around tourist objects, without having to take up space for the conversion of crooked land that has been used to build and develop Stambran Park ecotourism. This is certainly very encouraging in the midst of the growing number of retailers.

Keywords: Community Empowerment, Land Function Transfer, Ecotourism

Abstrak

Orientasi masyarakat desa secara faktual perlahan mulai bergeser dari agraris menuju industri. Akibatnya tentu kemudian menurunnya minat terhadap dunia agraris –baik pertanian maupun perkebunan- di tengah masyarakat desa, utamanya yang sudah memasuki wilayah administratif kota, salah satunya desa Tambangan di kota Semarang. Oleh karenanya perubahan orientasi juga nampak pada pengelolaan lahan bengkok. Hingga kemudian mulai bermunculan gagasan untuk mengalih fungsikan lahan bengkok menjadi area ekowisata yang lebih menghasilkan. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan spesifikasi studi diskriptif, artikel ini mencoba menggali tentang pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata di desa Tambangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan bengkok di RW 1 Tambangan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik internal berarti. Alih-alih menimbulkan ketegangan, hadirnya ekowisata di wilayah tersebut justru memunculkan ide-ide baru yang memiliki potensi positif baik sosial maupun ekonomi. Adapun konsep ekowisata yang diterapkan oleh warga RW

1 Tambangan diwujudkan dalam pola integratif antara bermain dan belajar di alam dengan nama ekowisata “Taman Stambran”. Selain itu dampak positif yang didapatkan pada sektor ekonomi, sangat berarti bagi para pedagang kecil yang notabene para penduduk asli wilayah tersebut. Hasil positif di bidang ekonomi ini bisa dilihat dari mulai berdirinya toko-toko kecil di sekitar objek wisata, tanpa harus memakan ruang alih fungsi lahan bengkok yang sudah digunakan untuk membangun dan mengembangkan ekowisata Taman Stambran. Ini tentu sangat menggembirakan di tengah menjamurnya retail-retail yang menghegemoni di seluruh Indonesia yang disebut-sebut mematikan pedang kecil.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Alih Fungsi Lahan, Ekowisata*

PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki kearifan masing-masing dalam menentukan laju kembang sosioekonomi di wilayahnya. Khususnya di daerah pedesaan, tentu pertanian dan perkebunan masih menjadi titik tumpu penghasilan sebagian masyarakat. Ketersediaan lahan yang masih luas, sistem irigasi yang mendukung, serta jam kerja yang fleksibel menjadi alasan kuat kenapa masyarakat di pedesaan menentukan pertanian sebagai pijakan dalam menghidupi sanak keluarga. Alhasil lahan pertanian juga dijadikan sebagai bentuk apresiasi dan imbalan bagi para lurah berikut perangkat di sebagian besar desa di Indonesia. Sistem ini dinamakan bengkok. Dimana hak kelola akan penuh menjadi milik para perangkat desa selama mereka menjabat.

Secara legal formal tanah bengkok sendiri (seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang termuat dalam Pasal 1 ayat 5) adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan kepada kepala desa dan perangkat desayang bersangkutan. Beberapa macam tanah milik adat yang berkaitan dengan tanah bengkok, yaitu: a) Tanah milik desa adat, misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan pasar, balai desa, yang hasilnya dimasukkan ke dalam kekayaan desa, yang pajaknya dipikul oleh desa adat itu. b) Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan.

Hal yang sama juga diterapkan di desa Tambangan kecamatan Mijen kota Semarang. Dimana tanah bengkok yang secara historis merupakan peninggalan para pendahulu –yang dalam redaksi PP No. 72 tahun 2005 masuk dalam kategori a)- juga diberikan kepada para perangkat desa. Kendati secara regulasi kepala desa tidak dipilih langsung oleh masyarakat layaknya wilayah kabupaten, namun mereka tetap mendapatkan tanah bengkok selama masa menjabat. Kemudian perangkat desa di tingkat RW (dukuh) yang notabene dipilih secara

langsung oleh masyarakat di dukuh masing-masing, tentu juga mendapatkan bengkok di wilayah dukuh tersebut. Dalam konteks ini, hanya RW yang mendapatkan bengkok selama masa menjabat 5 tahun. Setelah itu, tanah bengkok diserahkan kembali ke desa, kecuali ia kembali menjabat di periode kedua dari hasil pemilihan di masyarakat dukuh. Sementara itu menurut Savitri (2016: 56) lahan bengkok dalam perspektif agrarian di Jawa merupakan lahan yang secara kepemilikan dan garapan menjadi hak desa. Tanah atau lahan bengkok pada akhirnya tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan tanpa sepengetahuan, izin dan kesepakatan secara komunal seluruh warga desa. Namun dalam bentuk sewa lahan, ini diperbolehkan bagi mereka yang mempunyai hak untuk menyewakannya. Hak ini biasanya dimiliki oleh perangkat desa dalam periode jabatan tertentu.

Tanah bengkok di desa Tambangan sendiri saat ini keseluruhannya berupa persawahan. Kondisi tersebut secara perlahan mulai kurang efektif dengan perkembangan wilayah kecamatan Mijen yang lambat laun menjadi wilayah baru perkotaan Semarang. Desa Tambangan yang notabene masuk dalam wilayah tersebut juga mengalami hal demikian, di mana industri, properti dan perniagaan mulai tumbuh di wilayah yang pada kurun 1970-an masih masuk wilayah kabupaten Kendal –sebelum akhirnya dimekarkan untuk masuk wilayah kota Semarang-. Perkembangan itu pada akhirnya juga mulai memengaruhi pola mata pencaharian masyarakat yang awalnya agraris berubah menjadi industry. Alhasil bengkok yang diberikan kepada para perangkat juga sedikit banyak kehilangan eksistensinya, karena semakin sulitnya mencari pekerja tani dan cost pengelolaan yang juga tidak murah.

Inilah yang kemudian memunculkan berbagai pertimbangan untuk kembali menentukan orientasi baru terhadap –setidaknya sebagian- tanah bengkok yang ada di desa Tambangan. Dukuh Tambangan (RW1) desa Tambangan adalah salah satu yang pertama mengambil inisiatif tersebut. Setelah melalui diskusi dan musyawarah antar pengurus RT-RW kemudian pada tahun 2019 dicetuskan untuk mengalih fungsikan sebagian lahan bengkok di dukuh tersebut untuk kemudian dikelola menjadi ekowisata. Ini sangat potensial, mengingat posisi dukuh Tambangan sebagai sentra kelurahan tersebut merupakan jalur yang dilewati para wisatawan lokal –utamanya di akhir pekan- menuju berbagai objek wisata di sekitar kecamatan Mijen dan wilayah kabupaten Kendal. Tanah seluas sekitar 1000m² ini kemudian secara bertahap dirubah menjadi ekowisata dan lapangan sepak bola ini ternyata berhasil menghidupkan sektor ekonomi masyarakat sekitar.

4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi deskriptif. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan mencari data mengenai pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata di desa Tambangan. Lebih lanjut Penelitian ini dilakukan di desa Tambangan sebagai objek penelitian. Adapun sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat melalui wawancara yang mendalam kepada para informan. Wawancara yang mendalam dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan pihak pengurus desa, Karang Taruna, dan beberapa masyarakat yang terlibat dalam program rintisan ekowisata di desa Tambangan. Sedangkan Sumber data sekunder berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil penelitian. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen yang terkait dengan program rintisan ekowisata di desa Tambangan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada Milles & Huberman dalam Sugiyono (2010) yang terbagi dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian proses reduksi data adalah sebagai berikut. Pertama, data yang didapat dari wawancara merupakan data mentah. Selanjutnya peneliti memilah-milah data yang dikumpulkan. Kedua, setelah data dipilah-pilah peneliti melakukan pengkodean data, artinya mengkodekan data menggunakan simbol, berdasarkan informan dan waktu wawancara untuk mempermudah mencari data. Ketiga, data yang sudah diberi kode, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Setelah data dipilah-pilah dan disesuaikan dengan fokus penelitian maka peneliti melakukan penyajian data. Peneliti menyajikan data yang bermakna tersebut dalam bentuk narasi atau uraian yang lebih mudah dipahami dan lebih komunikatif.

3. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Setelah data disajikan peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal berdasarkan hasil temuan data. Setelah data diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan konsisten dengan kondisi saat dilakukan penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara informan yang satu dengan yang lain selain itu ada pula digunakan Triangulasi Teknik yaitu membandingkan data dilihat dari analisis dari ketiga teknik yang dilakukan.

KERANGKA TEORITIS

Pemberdayaan Masyarakat

Mengenai Pemberdayaan masyarakat Sumodiningrat (1999, h.133-134) mengemukakan pendapatnya bahwa proses pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan dalam tiga jalur, yakni: (1) *Enabling*, sebuah upaya mewujudkan satu iklim yang bisa meningkatkan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri; (2) *Empowering*, menguatkan daya serta potensi yang sudah dikembangkan dalam tahap *enabling*; (3) *Protecting*, yakni sebuah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan dalam konteks ini bisa berupa advokasi dan edukasi agar dua proses yang sudah dicapai sebelumnya bisa tetap berjalan dan mampu menunjukkan stabilitas. Alhasil, dalam konsep ini pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai upaya guna mengoptimalkan potensi dan kemampuan masyarakat hingga mencapai tahap kemandirian serta mampu lepas dari belenggu keterbelakangan dan juga kemiskinan.

Sebenarnya konsep di atas bukanlah konsep tunggal tentang pemberdayaan masyarakat. Masih banyak konsep tentang tema ini dari para ahli. Namun satu di antara yang cukup kredibel adalah milik Robbins, Chatterjee & Canda sebagaimana dikutip Mustangin, dkk (2017: 63) yang menyatakan bahwa ini merupakan sebuah proses bagi individu maupun kelompok guna meraih kuasa, agar sumber daya yang notabene milik mereka bisa diakses, serta bisa melakukan control atas hidup mereka sendiri. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rappaport (dalam Hamill & Stein, 2011) bahwa pemberdayaan merupakan proses secara kolaboratif yang mana pihak yang kurang-bahkan tidak-berdaya akan sumber daya digerakkan untuk membangkitkan,

mengembangkan dan meningkatkan akses serta control dari sumber daya tersebut guna menyelesaikan problem pribadi ataupun masyarakat.

Sementara itu pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pembangunan kerap kali dikaitkan dengan konsep partisipatif, kemandirian, keadilan dan jaringan kerja. Aspek partisipatif sendiri merupakan aspek terpenting dalam menumbuhkan kemandirian serta pemberdayaan. Secara strategis, pemberdayaan meletakkan *positioning* partisipasi masyarakat sebagai isu utama dalam pembangunan. Artinya di samping urgensi pemberdayaan masyarakat itu sendiri, ada hal lain yang bisa jadi kendala implementasi dalam segi praktik pemberdayaan (Craig & Mayo, 1995). Bahkan problem tersebut akan merambah pada ketidakjelasan konsep tentang apa itu pemberdayaan, batasan tentang keberhasilan pemberdayaan, peran masing-masing masyarakat, pemerintah serta swasta, cara pencapaian dan sebagainya (Prasojo, 2004: 11). Artinya jika ditarik garis merah, pemberdayaan sejatinya merupakan upaya untuk membuat masyarakat berdaya atas diri sendiri serta akses sumberdaya dengan tanpa meninggalkan aspek partisipasi, kemandirian, keadilan dan jaringan kerja sebagai syarat secara implementatif-praktis dari pemberdayaan itu sendiri.

Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan fenomena yang banyak sekali di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai macam perspektif lahir menyikapi fenomena ini juga tidak dapat dihindarkan. Sebagian besar yang muncul ke permukaan –apalagi bagi para pecinta alam- alih fungsi lahan seringkali distigma sebagai sesuatu yang negatif. Ini wajar, karena apa yang nampak dan muncul di media memang demikian. Karena memang, jika tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dan tidak dikawal alih fungsi lahan ini bisa saja menjadi aktifitas yang benar-benar mengancam kelestarian alam bukan hanya di Negeri ini namun juga di dunia.

Utamanya bagi setiap tempat/wilayah yang tengah berkembang, proses alih fungsi lahan merupakan satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Ini karena wilayah tersebut memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan di saat yang sama kebutuhan lahan untuk fasilitas umum –termasuk di dalamnya industri serta pemukiman juga meningkat. Proses alih fungsi lahan ini bisa jadi dimulai dengan sistem pelepasan lahan, utamanya melalui proses penjualan lahan yang nantinya akan berbuntut dengan melonjaknya harga lahan sehingga semakin memancing minat masyarakat untuk menjual lahannya. Namun jika ditinjau dari gejala secara umum, kesediaan pemilik lahan –utamanya lahan pertanian- untuk mengalihfungsikan lahan

⁶ dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, faktor eksternal. Faktor ini berupa tumbuh pesatnya kawasan, ekonomi dan demografi. *Kedua*, faktor internal. Faktor ini berupa kondisi sosio-ekonomi pemilik lahan –di dalamnya keluarga-. *Ketiga*, faktor kebijakan. Faktor ini terjadi jika muncul aturan atau perundang-undangan yang kemudian dilaksanakan sehingga pemilik lahan terkena imbas aturan tersebut (Jannah, dkk, 2017: 2).

Alhasil pengalih fungsian lahan memang merupakan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi di daerah berkembang seperti di Indonesia. Bahwa benar aspek internal sangat berperan besar dalam proses ini, namun jika masyarakat kemudian dihadapkan dengan kendala ekonomi dan lebih dari itu dibenturkan aturan tentang adanya pembangunan dan sebagainya, maka masyarakat pasti tidak berkutik dalam proses pelepasan lahan ini. Pada tahap ini maka kebijaksanaan dari semua pihaklah yang menjadi penentu dari kelangsungan lahan, yang tidak sedikit bahkan merupakan area resapan dan konservasi. Sebab jika tidak muncul kebijaksanaan disini, maka semua akan menerima dampak negative dari lingkungan, bahkan sosial di kemudian hari.

Ekowisata

² Dowling dalam Tanaya dan Rudiarto (2014: 73) menyatakan bahwa ekowisata dapat dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan 5 elemen inti, yaitu bersifat alami, berkelanjutan secara ekologis, lingkungannya bersifat edukatif, menguntungkan masyarakat lokal, dan menciptakan kepuasan wisatawan. Berdasarkan definisi-definisi dari berbagai tokoh, Fennell (2003) kemudian merangkum pengertian ekowisata sebagai sebuah bentuk berkelanjutan dari wisata berbasis sumberdaya alam yang fokus utamanya adalah pada pengalaman dan pembelajaran mengenai alam, yang dikelola dengan meminimalisir dampak, non-konsumtif, dan berorientasi lokal (kontrol, keuntungan dan skala). Goeldner (1999, dalam Butcher, 2007), menyatakan bahwa ekowisata merupakan bentuk perjalanan menuju kawasan yang masih alami yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah alami dari lingkungannya, menjaga integritas ekosistem, sambil menciptakan kesempatan ekonomi untuk membuat sumber daya konservasi dan alam tersebut menguntungkan bagi masyarakat lokal. Terlihat jelas bahwa perlu adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat lokal, sehingga ekowisata harus dapat menjadi alat yang potensial untuk memperbaiki perilaku sosial masyarakat untuk tujuan konservasi lingkungan (Buckley, 2003).

PEMBAHASAN

Pemberdayaan berbasis Ekowisata di desa Tambangan

Tambangan sebagai salah satu kelurahan di kecamatan Mijen kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ini terletak di Jalan. RM Hadi Soebeno S Semarang. Kelurahan yang memiliki Luas Wilayah ± 357,92 ini merupakan wilayah strategis karena terletak tepat di jalur Semarang-Boja (Kendal) yang merupakan rute tujuan wisata lokal berbasis alam, panorama dsb. Wilayah ini berbatasan dengan – sebelah barat dengan Kelurahan Jatisati dan Kelurahan Cangkiran; sebelah utara dengan Kelurahan Mijen; sebelah timur dengan Kelurahan Purwosari dan sebelah selatan dengan Kelurahan Cangkiran dan Kelurahan Bubakan. Adapun total jumlah penduduk desa Tambangan terhitung pada Maret 2020 mencapai 5.570 jiwa yang menempati pada pembagian 4 wilayah RW dengan total 14 RT di dalamnya (keltambangan.semarangkota.go.id).

Adapun secara spesifik yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah RW 1 dukuh Tambangan desa Tambangan kecamatan Mijen kota Semarang. Alasan mengapa wilayah tersebut diambil sebagai fokus kajian adalah adanya alih fungsi lahan bengkok menjadi ekowisata. Tentu ini merupakan suatu yang spesial karena biasanya alih fungsi lahan bengkok dalam tatanan suatu masyarakat memiliki potensi adanya konflik. Ini wajar, mengingat tanah bengkok yang seharusnya menjadi hak dari para perangkat desa/dukuh kemudian akan hilang – apapun wujudnya-. Tentu pada akhirnya harus ada ganti rugi yang apabila salah dalam bersikap tentu menjadi masalah baru bagi intern warga desa, utamanya berupa kecemburuan sosial.

Maka menjadi sebuah keistimewaan saat akhirnya alih fungsi lahan bengkok di RW 1 Tambangan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik internal berarti. Alih-alih menimbulkan ketegangan, hadirnya ekowisata di wilayah tersebut justru memunculkan ide-ide baru yang memiliki potensi positif baik sosial maupun ekonomi. Menjadi tidak mengeheran jika kemudian pembangunan ekowisata tersebut juga dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Kendati dana terbesar diambil dari hasil laba pengelolaan air minum desa (yang dikelola secara internal bukan milik PDAM), namun adanya peran secara finansial dari warga merupakan sinyal positif dari strategi pemberdayaan yang diterapkan.

Kemudian konsep ekowisata yang diterapkan oleh warga RW 1 Tambangan diwujudkan dalam pola integratif antara bermain dan belajar di alam dengan nama ekowisata “Taman Stambran”. Aspek “bermain” muncul dengan adanya beberapa wahana, seperti kolam renang dan kolam terapi ikan. Adapun aspek belajar/edukasi diwujudkan dalam taman-taman bunga dan

persawahan itu sendiri. Keduanya dipadu padankan menjadi satu konsep sederhana dan murah agar bisa diakses oleh semua kalangan. Harga tiket yang hanya Rp. 5.000,- tentu menjadi sebuah keniscayaan bagi semua kalangan untuk menikmati objek ekowisata Taman Stambran ini. Selain berfungsi sebagai ekowisata, Taman Stambran ini juga dijadikan pusat kegiatan olahraga dan kesenian warga. Olah raga bertempat di lapangan desa yang menempel pada area tersebut, dan selalu ramai pada sore hari. Sementara kegiatan kesenian biasanya diadakan pada malam hari, mulai dari musik tradisional, sampai dengan musik rebana, semuanya mendapatkan ruang bereksplorasi di tempat ini.

Alhasil walaupun tidak ada pengunjung dari luar desa, setidaknya Taman Stambran menjadi alternatif ruang belajar dan bermain anak-anak di RW 1 Tambangan agar bisa bersosialisasi kepada sesame dan tidak hanya terpaku pada trend *gadget* –yang memunculkan banyak resiko negatif untuk seusia mereka- semata. Singkatnya, hadirnya ekowisata Taman Stambran ini pada gilirannya benar-benar menerapkan makna swadya yang sesungguhnya. Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pada tataran ini benar-benar diterapkan dalam sosiokultur masyarakat RW 1 Tambangan. Maka tidak mengherankan kemudian jika akhirnya dampak positif tersebut juga menyentuh sektor ekonomi, utamanya bagi para pedagang kecil yang notabene para penduduk asli wilayah tersebut.

Hasil positif di bidang ekonomi ini bisa dilihat dari mulai berdirinya toko-toko kecil di sekitar objek wisata, tanpa harus memakan ruang alih fungsi lahan bengkok yang sudah digunakan untuk membangun dan mengembangkan ekowisata Taman Stambran. Ini tentu sangat menggembirakan di tengah menjamurnya retail-retail yang menghegemoni di seluruh Indonesia. Retail-retail yang dalam penelitian Ginting (2018: 67) disebut-sebut mematikan pedagang kecil ini memang seperti dua sisi mata uang bagi masyarakat. Satu sisi sangat dibutuhkan dengan modernitas dan kepraktisan yang ditawarkan, namun di sisi yang lain membuat para pedagang tidak berkulit jika harus beradu “otot” dengan modal besar di belakang retail. Terbukti dengan adanya **penurunannya omset yang signifikan, dengan range penurunan omset antara 25%-60%** menjadi bukti nyata betapa sisi lain dari hadirnya retail itu benar-benar harus segera disikapi dengan bijak.

Upaya ini pada akhirnya muncul dari masyarakat Tambangan pengembangan ekowisata Taman Stambran. Tidak bisa memang melakukan *head to head* dengan kapital retail yang begitu luar biasa dari segi permodalan, namun langkah-langkah semacam ini patut dijadikan contoh

oleh desa-desa lain dalam memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Jumlah pengunjung yang mulai stabil dari hari-kehari yang mayoritas adalah warga desa dari berbagai RT dan RW tentu menjadi sebuah tanda bahwa masyarakat di saat yang bersamaan bersedia mendukung langkah ekowisata Taman Stambran. Karena jika masyarakat setempat saja tidak mau berkunjung dan berperan aktif –dalam segi ticketing utamanya- perkembangan ekowisata Taman Stambran mustahil akan bisa tumbuh. Alih-alih justru akan usang dimakan waktu sebab wisata serupa dengan “wajah” yang lebih mewah di sekitar wilayah kecamatan Mijen dan Perbatasan Kendal juga mulai bermunculan. Namun beruntung masyarakat Tambangan tidak egois, dan mau untuk sejenak berbagi dengan bersama-sama menghidupkan ekowisata yang digagas sebagai alternatif dalam memajukan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan bengkok di RW 1 Tambangan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik internal berarti. Alih-alih menimbulkan ketegangan, hadirnya ekowisata di wilayah tersebut justru memunculkan ide-ide baru yang memiliki potensi positif baik sosial maupun ekonomi. Adapun konsep ekowisata yang diterapkan oleh warga RW 1 Tambangan diwujudkan dalam pola integratif antara bermain dan belajar di alam dengan nama ekowisata “Taman Stambran”. Aspek “bermain” muncul dengan adanya beberapa wahana, seperti kolam renang dan kolam terapi ikan. Adapun aspek belajar/edukasi diwujudkan dalam taman-taman bunga dan persawahan itu sendiri. Keduanya dipadu padankan menjadi satu konsep sederhana dan murah agar bisa diakses oleh semua kalangan. Selain itu dampak positif yang didapatkan pada sektor ekonomi, sangat berarti bagi para pedagang kecil yang notabene para penduduk asli wilayah tersebut. Hasil positif di bidang ekonomi ini bisa dilihat dari mulai berdirinya toko-toko kecil di sekitar objek wisata, tanpa harus memakan ruang alih fungsi lahan bengkok yang sudah digunakan untuk membangun dan mengembangkan ekowisata Taman Stambran. Ini tentu sangat menggembirakan di tengah menjamurnya retail-retail yang menghegemoni di seluruh Indonesia yang disebut-sebut mematikan pedagang kecil.

Referensi

- R. Janah, B. T. Eddy dan T. Dalmyiatun, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Jurnal Agrisocionomics1(1) Mei 2017.
- Ginting, Selpi Yana Br., *Keberadaan Mini Market Alfamart dan Indomaret Kaitannya dengan Tingkat Penghasilan Pedagang Tradisional di Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*. Jurnal Swarnabhumi Vol. 3, No. 1, Agustus 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Buckley, Ralf. 2003. *Case Studies in Ecotourism*. Cambridge: CABI.
- Savitri, Miya, 2016. *Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa*. Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2016.
- Mustangin, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No. 1, Desember 2017.
- Nugroho, Agustino Adi, 2008. *"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)"*. Malang: FIA UB.
- Nugroho, Trilaksono, 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang, FIA. Universitas Brawijaya.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Tanaya, Dhayita Rukti dan Iwan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang*. Teknik PWK; Vol. 3; No. 1; 2014.
- Butcher, Jim. 2007. *Ecotourism, NGO's, and Development: A Critical Analysis*. NewYork: Routledge.
- Craig, G. and Mayo, M. (eds) (1995) *Community Empowerment. A Reader in Participation and Development*. London: Zed Books. Pp. 1-11.
- keltambangan.semarangkota.go.id

jurnal ekowisata siap kirim

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unib.ac.id Internet Source	8%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	4%
3	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	2%
5	keltambangan.semarangkota.go.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	journal.fib.uho.ac.id Internet Source	1%
8	docobook.com Internet Source	<1%
9	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1%

10	www.scribd.com Internet Source	<1 %
11	deidarma-akatsuki.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
13	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
14	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
15	turcomat.org Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On